LAKIP
2022

LAPORAN CAPAIAN KINERIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat 10110

mswordcoverpages.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah periode Triwulan IV Tahun 2022.

Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dijelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara, memiliki tiga sasaran strategis yang saling berkaitan yaitu: terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif; tercapainya pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal; dan terselenggaranya pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2022, sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dan pengendalian terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pertahanan negara, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara ini sebagai refleksi dan evaluasi kinerja organisasi sampai dengan akhir periode Triwulan IV tahun 2022 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 10 Februari 2023

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,

Heri Wiranto, S.E.,M.M.,M.Han.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Rangkuman Eksekutif 1

Bab I Pendahuluan 3

A. Latar Belakang 3

B. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 3

C. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 4

Bab II Perencanaan Kinerja 6

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 6

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2022 10

C. Jumlah Anggaran 12

Bab III Akuntabilitas Kinerja 13

A. Pengukuran Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2022 13

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 14

C. Realisasi Anggaran 70

Bab IV Penutup 71

A. Analisis dan Hambatan 71

B. Kesimpulan 82

Lampiran 84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 pada Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan pegara.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2022 adalah terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan 3 indikator kinerja yakni:

1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada kementerian/lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 90%; dan
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.

Selain itu, terdapat Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya, yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dengan empat Indikator Kinerja, antara lain:

1. Nilai SAKIP, dengan target BB;
2. Nilai PMPRB, dengan target 50;
3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 85; dan
4. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di atas dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan rapat, pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap permasalahan terkait pada tahun anggaran 2022, khususnya terhadap temuan permasalahan yang menonjol dalam bidang pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) dan Kontribusi Industri Pertahanan terhadap MEF untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan Alutsista TNI serta permasalahan wilayah perbatasan.

Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan memperbandingkan antara capaian realisasi kinerja dengan target hingga akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga akhir Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TW IV 2022	% Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	82,09%	96,58%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	90%	100%	111,11%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%	66,67%	83,33%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	BB (76,60)	100%
	2. Nilai PMPRB	50	56,06	112,12%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	88,50	104,12%
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,41	110,25%
Rata-rata Persentase (%) Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga akhir Tahun 2022				102,50%

Secara umum pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang diperoleh hingga akhir Triwulan IV Tahun 2022 adalah Baik, meskipun dua indikator kinerja tidak dapat mencapai trget yang ditentukan, tetapi empat indikator kinerja berhasil melampaui target dan satu indiktor kinerja berhsil mencapai target yang ditentukan. Namun demikian, secara umum proses pelaksanaan kinerja program dan kegiatan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat berjalan dengan baik.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Capaian Kinerja (Lakin) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, sebagaimana yang diamanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

Laporan Capaian Kinerja (Lakin) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2022 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2022. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja (Lakin) ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja (Lakin) juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat dengan Deputi IV/Hanneg mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi IV/Hanneg menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 130 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

C. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Pada Pasal 131 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021, struktur organisasi Deputi IV/Hanneg terdiri atas:

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
3. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan;
4. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan.

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidkoor Pertahanan Negara

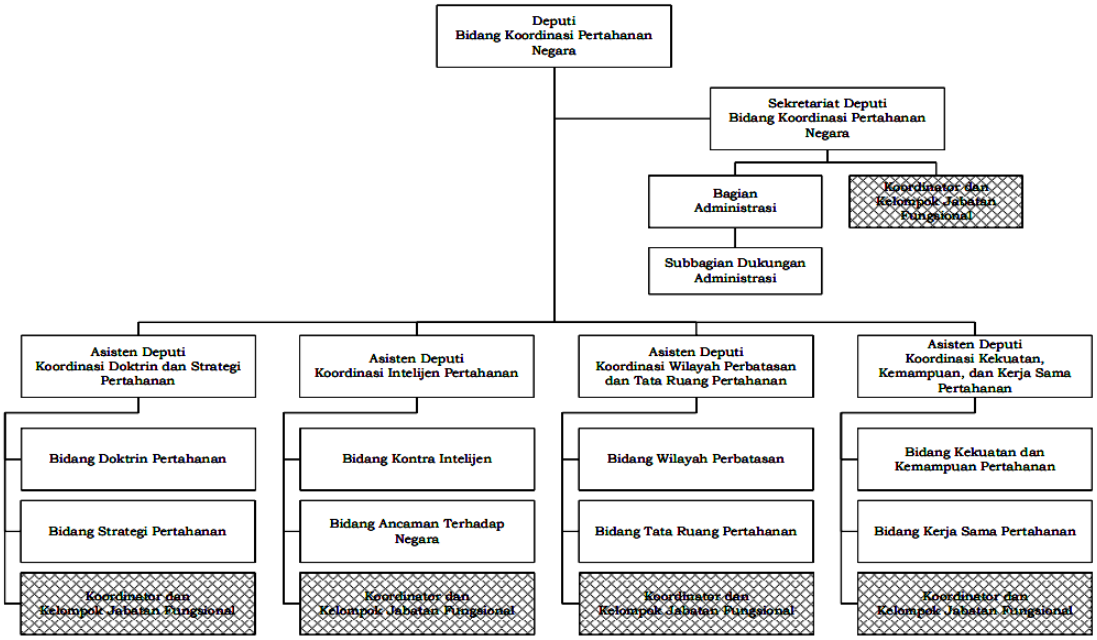

Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktifitas kegiatan dengan komposisi, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Deputi	Eselon I	1 Orang
2.	Sekretaris Deputi	Eselon II	1 Orang
3.	Asisten Deputi	Eselon II	4 Orang
4.	Kepala Bidang	Eselon III	6 Orang
5.	Kepala Bagian/Perencana Ahli Madya	Eselon III	2 Orang
6.	Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional Ahli Muda	Eselon IV	3 Orang
7.	Analis Kebijakan Ahli Muda	-	1 Orang
8.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	-	2 Orang
9.	Analis Politik, Hukum, dan Keamanan	-	2 Orang
10.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	-	1 Orang
11.	Pengelola Program dan Kegiatan	-	1 Orang
12.	Pengadministrasi Umum	-	2 Orang
13.	PPNPN	-	3 Orang
Total SDM			**29 Orang**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

1. Visi dan Misi

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2020–2024 adalah "**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".**

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara menetapkan visi: "**Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan Bidang Pertahanan Negara untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**".

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara tahun 2020–2024, yaitu:

a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal;
b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan yang efektif;
c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan melalui:

a. Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
b. Koordinasi intelijen pertahanan;
c. Koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
d. Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan; serta
e. Penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.
f. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, perbaikan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara menetapkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2020–2024, yaitu:

1) Memperkuat stabilitas pertahanan negara

   Indikator: Persentase penyelesaian permasalahan bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan yang efektif.

2) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Indikator: Indeks pelaksanaan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020–2024). Dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2020–2024, Sasaran Strategis Bidang Pertahanan Negara adalah Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan.

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, disusun sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran untuk tahun 2020–2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Bidang Pertahanan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Stabilitas Bidang Pertahanan Negara	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal	1. Nilai SAKIP
		2. Nilai PMPRB
		3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi

	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.
Memperkuat Stabilitas Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Intelijen Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2020–2024).

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), maka Deputi Bidkor Hanneg menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pernyataan perjanjian kinerja antara Pemberi Amanat (Menko Polhukam) dengan Penerima Amanat (Deputi Bidkoor Hanneg). Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Deputi Bidkor Hanneg sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Berikut sasaran strategis dan IK Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara beserta dengan nilai targetnya:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Deputi IV/Hanneg T.A. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	90%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	50
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Dari tabel tersebut, Deputi IV/Hanneg di Tahun 2022 ini mempunyai beberapa sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, yaitu:

1. Sasaran strategis terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada kementerian/lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
   b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 90%; dan
   c. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.
2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya adalah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal yakni dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu :
   a. Nilai SAKIP, dengan target BB;
   b. Nilai PMPRB, dengan target 50;
   c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 85; dan
   d. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

C. Jumlah Anggaran

Jumlah Pagu awal Anggaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp.10.195.723.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada periode Triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV	% Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	82,09%	96,58%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional	90%	100%	111,11%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%	66,67%	83,33%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	BB (76,60)	100%
	2. Nilai PMPRB	50	56,06	112,12%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	88,50	104,12%
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,41	110,25%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2022

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kedeputian Bidkoor Hanneg dapat dijelaskan dengan pengungkapan setiap sasaran strategis beserta IK-nya sebagai tolok ukur.

1. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif

a. **Indikator Kinerja 1.1**: **Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional.**

Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian *Minimum Essential Force* (MEF) dan persentase capaian Industri Pertahanan.

1) **Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force*/MEF)**

Perbandingan kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara dapat diukur dengan menggunakan *Global Fire Power Index*, yaitu indeks kekuatan suatu negara yang dihitung atau dikeluarkan oleh suatu lembaga internasional. Indeks tersebut menghitung kekuatan suatu negara berdasarkan pada banyak aspek yang akan mempengaruhi kekuatan militernya, diantaranya adalah aspek:

a) SDM yaitu jumlah penduduk suatu negara dengan jumlah warga yang memiliki umur produktif yang siap dikerahkan dalam kondisi darurat;
b) Personil militer aktif yang dimiliki pada tiap kekuatan di AD, AL dan AU;
c) Alutsista yang dimiliki pada tiap kekuatan, baik itu kekuatan di darat, kekuatan di laut dan kekuatan di udara;
d) Sumber daya alam yang dimiliki yang mampu dikerahkan untuk pertahanan;
e) Geografi yaitu posisi strategis suatu negara;
f) Keuangan yaitu kekuatan financial yang dimiliki suatu negara; dan banyak aspek lainnya.

Berdasarkan pada berbagai aspek penilaian tersebut di atas, Kekuatan Militer Indonesia pada awal Januari tahun 2022 oleh *Global Fire Power Index* dikategorikan berada pada posisi 15 dunia dengan nilai indeks 0.2251. Posisi ini naik dari tahun 2020 yang berada di peringkat 16 dunia dengan nilai indeks 0,25. Semakin kecil nilai index GFP atau mendekati 0,000 berarti secara teoritis semakin kuat kemampuan tempur suatu negara, sehingga nilai indeks GFP Indonesia Tahun 2022 menunjukkan ada peningkatan kemampuan pertahanan yang dimiliki Indonesia dibandingkan tahun 2020.

Perhitungan kekuatan militer seperti yang dilaksanakan oleh *Global Fire Power Index* tersebut di atas, tidak dapat disamakan atau diterapkan pada Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan dan menghitung kekuatan militernya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 yang merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara dan menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan cara:

a) Implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung,
b) Pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar;
c) Penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan;
d) Pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional;

e) Revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara;
f) Peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia; dan
g) Peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

Untuk memperkuat sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam dibutuhkan alat peralatan pertahanan dan sarana prasarana maupun lainnya yang dibakukan dalam standarisasi capaian yang disebut *Minimum Essential Force* (MEF). Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force*/MEF) merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

Sasaran utama MEF ialah membangun komponen utama TNI sampai mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani baik pada level regional maupun internasional. Penekanan diberikan pada kata minimum yang merujuk pada fakta bahwa MEF tidak diarahkan kepada konsep perlombaan senjata maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang secara total, melainkan sebagai satu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal.

Aspek penghitungan MEF terdiri dari empat variabel, yaitu:

a) Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);
b) Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista;
c) Sarana dan Prasarana Pertahanan; serta
d) Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.

Penghitungan capaian nilai MEF secara teknis dihitung setiap tahunmya oleh jajaran Kementerian Pertahanan berdasarkan empat variabel di atas. Namun demikian, capaian nilai MEF yang selama ini dihitung setiap tahun seluruhnya hanya berasal dari penghitungan terhadap variabel alutsista, dikarenakan nominal atau jumlah dan wujud dari variabel ini lebih konkret dan lebih mudah untuk dihitung. Sedangkan untuk tiga variabel lainnya, Kemenhan mengalami kesulitan untuk mencari formula penghitungan dikarenakan lebih rumit diaplikasikan sehingga tiga variabel ini belum digunakan dalam penghitungan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai MEF yang ada saat ini adalah cermin dari kekuatan alutsista yang dimiliki oleh militer Indonesia khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik itu TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.

Pembangunan MEF disusun berdasarkan pada:

1. Skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*);
2. Kemampuan yang menjadi kemandirian (*capability based defense*);
3. Berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara; dan
4. Dapat terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat.

Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, pengadaan dan ditambah dengan strategi penghapusan. Keempat strategi tersebut bergantung pada konsistensi, komitmen dan kontinuitas dari sistem penyelenggaraan MEF (baik di Mabes TNI maupun TNI AD, TNI AL dan TNI AU).

Kebijakan pembangunan MEF yang dilakukan melalui 3 (tiga) Renstra yaitu Renstra I Tahun 2010–2014, Renstra II Tahun 2015–2019, dan Renstra III Tahun 2020–2024 dilaksanakan secara bertahap melalui pengadaan/pembelian dan optimalisasi produksi industri pertahanan dalam negeri, dengan pemenuhan target hingga tahun 2024.

Capaian MEF yang didapat pada setiap tahapnya adalah sebagai berikut:

1) Tahap I dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2014, dengan pencapaian 54,57% dari target 57,24%.

2) Tahap II dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019, dengan pencapaian 63,19% dari target 75,54%. Pencapaian MEF Alutsista per angkatan hingga akhir tahap II pada tahun 2019 adalah Matra Darat mencapai 78,82%, Matra Laut 67,57% dan Matra Udara 45,19%.

3) Tahap III (target pemenuhan 100%) dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awal Tahap III di tahun 2020, berdasarkan Laporan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020 capaian MEF terpenuhi sebesar 62,31% dari target 79%, dengan capaian alutsista per angkatan adalah sebesar 74,62% untuk Matra Darat, 68,72% untuk Matra Laut dan 44,40% untuk Matra Udara. Capaian MEF tahun 2020 ini, mengalami penurunan dari nilai MEF tahun 2019 dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tua dan tidak layak pakai, namun demikian pada Tahun 2020 ini alutsista TNI mendapatkan penambahan baru. Penambahan tersebut diantaranya dengan pembelian alutsista produksi dalam negeri yang memenuhi syarat penggunaan kebutuhan militer.

Surat Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Nomor B/3382/03/09/18/DJKUAT tanggal 14 Desember 2021 hal Laporan Perkembangan Pencapaian MEF Tahun 2022, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

a. Pembangunan MEF atau pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI tidak lagi menjadi program yang ditetapkan untuk dilanjutkan karena yang akan dibangun adalah Kekuatan Pokok atau *Essential Force*. Program pembangunan menuju Kekuatan Pokok ini kemudian diterjemahkan pada Perisai Trisula Nusantara 25 Tahun.

b. Laporan Pencapaian MEF per 3 bulan tidak dapat diwujudkan karena berdasarkan Jakkum Hanneg 2021 untuk Renstra 2020–2024, penggunaan istilah MEF tidak digunakan lagi, sehingga laporan pencapaian tersebut tidak dapat disusun karena dasar pencapaian MEF III sudah tidak ada. Sehingga yang menjadi laporan adalah Laporan Kesiapan Operasional Alutsista TNI.

Kemenhan memberikan nilai Capaian MEF hingga Triwulan IV TA. 2022 adalah sebesar 63,48%. Nilai Capaian MEF ini disampaikan pada saat Rapat Koordinasi membahas Perhitungan MEF dan Kontribusi Indhan dalam Pemenuhan Kebutuhan Alutsista sesuai Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 tanggal 23 September 2022 di Kemenko Polhukam.

2) **Industri Pertahanan**

Industri Pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari *global supply chain*.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024, sasaran kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista setiap tahunnya dengan target yang sama yaitu sebesar ≥50%. Capaian Nilai Industri Pertahanan didapatkan dari Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022 belum ada data terbaru terkait capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

a) Pada Tahun 2022 target kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista sebesar ≥ 50%. Tetapi hal ini hanya didasarkan pada perhitungan capaian anggaran dari Dirjen Renhan, sedangkan Dirjen Pothan selaku pembina industri pertahanan belum melakukan perhitungan; dan

b) Masih dicari formula (rumus) perhitungan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista.

Dalam melaksanakan upaya kemandirian industri pertahanan perlu inpres dan perpres yang mewajibkan pengguna atau konsumen menggunakan industri pertahanan dalam negeri guna menekan impor dan menghidupkan ekosistem industri dalam negeri. Untuk kegiatan pemenuhan alpalhankam dan perawatan harus benar-benar selektif dengan industri pertahanan yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang tidak mengganggu proses pengadaan dan perawatan. Perlu audit *Technology Readiness Level* (TRL) alutsista yang dimiliki oleh TNI agar kemandirian alutsista yang dimiliki TNI dapat dipasok oleh indhan.

Pencapaian kontribusi industri pertahanan tersebut hingga saat ini masih sulit diukur. Meski rumus perhitungan bisa saja berbeda, bisa dilakukan dari aspek fisik, anggaran, ataupun TKDN. Namun demikian, penghitungan ini belum dapat dilakukan oleh Kemhan. Hingga saat ini kontribusi indhan hanya dilihat dari jumlah alokasi anggaran.

Sumber nilai capaian dua indikator di atas berasal dari Laporan Pencapaian MEF dan Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional:

1) Persentase Capaian MEF

$$\sum = \frac{\textit{Capaian MEF}}{\textit{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

2) Persentase Capaian Industri Pertahanan

$$\sum = \frac{\textit{Capaian Industri Pertahanan}}{\textit{Target Industri Pertahanan pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

3) Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Hanneg

$$\sum = \frac{\textit{Persentase Capaian MEF + Persentase Capaian Industri Pertahanan}}{2}$$

Hingga akhir periode Triwulan IV Tahun 2022, Kemenhan memberikan nilai Capaian MEF sebesar 63,48% saat Rapat Koordinasi membahas Perhitungan MEF dan Kontribusi Indhan dalam Pemenuhan Kebutuhan Alutsista sesuai Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 pada tanggal 23 September 2022 di Kemenko Polhukam. Sedangkan pada rapat yang sama, Kemenhan belum bisa memberikan data nilai capaian terakhir Industri Pertahanan.

Berdasarkan informasi di atas, perhitungan capaian target Pembangunan Bidang Pertahanan pada K/L di bawah Koordinasi Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional, adalah :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	RINCIAN REALISASI 2022			
Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	82,09%.	Uraian Indikator	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian
			a) Pemenuhan MEF 2022	86%	63,48%	73,81%
			b) Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista	≥ 50%	45,18%	90,36%

Rata-rata persentase capaian dari kedua indikator tersebut di atas adalah (73,81% + 90,36%) : 2 = 82,09%.

Walaupun nilai Capaian Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam belum mencapai target yang diamanatkan pada Dokumen Perencanaan Nasional, namun demikian Kemenko Polhukam dalam hal ini Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara terus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mencarikan dan memberikan solusi, diantaranya dengan:

1) Kemenko Polhukam telah mendorong ditandatangani dan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum

Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 pada tanggal 6 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, yang diarahkan pada peningkatan kemampuan pertahanan negara, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara bercirikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Kebijakan umum pertahanan militer meliputi Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung diarahkan pada terbangunnya pertahanan negara yang modern, Tentara Nasional Indonesia profesional, terlaksananya adopsi dan inovasi teknologi alat utama sistem senjata, meningkatnya kemandirian industri pertahanan, serta mendorong penganggaran dan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.

Perpres ini menjadi landasan hukum baru untuk Kemenhan dalam melaksanakan penghitungan MEF untuk tahap III tahun 2020–2024 dengan membuat aturan-aturan turunan yang mendukung perpres tersebut diantaranya dengan menetapkan permenhan baru sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia.

2) Kemenko Polhukam mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024, diantaranya:
   a) Rancangan permenhan sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia dan rancangan permenhan lainnya, yang saat ini sudah berada di meja Menteri Pertahanan.
   b) Rapat Lanjutan dengan Kemhan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2022 dan ke depan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku putih pertahanan.
   c) Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.

3) Mendukung dan mendorong Kementerian Pertahanan untuk melakukan pengajuan izin prakarsa penyusunan R-Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg 25 Tahun ke Depan sesuai surat Menteri Pertahanan RI nomor R/802/M/IX/2021 tanggal 3 September 2021.

b. **Indikator Kinerja 1.2**: **Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.**

Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif kebijakan yang paling baik diantara kebijakan lainnya.

Rekomendasi kebijakan bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan keluaran (*output*) yang dihasilkan dari rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi minimal empat tahapan yaitu:

1) Identifikasi Masalah;
2) Analisis Kebijakan;
3) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan; dan
4) Tindak Lanjut.

Pengukuran sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Data yang digunakan adalah hasil rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional, sebagai berikut:

$\sum$ = **µ% Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai Dokumen Perencanaan Nasional**

Keterangan: μ = rata-rata

Hingga akhir periode Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022, capaian rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh keasdepan di bawah Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional adalah sebagai berikut:

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
1.	Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan		**100**
a.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan Nomor B-178/HN.00.00/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Rekomendasi Penguatan Industri Pertahanan melalui Pemberda-yaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep DoktrindanStrategi Pertahanan pada poin 2 terkait dengan Koorsidal Penguatan Industri Pertahanan Dalam Negeri melalui Penyusunan Revisi Regulasi terhadap Industri Pertahanan.	**100**
b.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BNPB Nomor B-182/HN.00.00/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Rekomendasi Penguatan Siner-gitas K/L dengan TNI/Polri dalam penanggulangan bencana dan bahaya pandemi.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Doktrin dan Strategi Pertahanan pada poin 1 terkait dengan Koorsidal Pening-katan Sinergitas TNI/Polri dan K/L Dalam Penanganan Bencana.	**100**
2.	Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan		**100**
a.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-35/HN.00.01/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Rekomendasi Percepatan Proses Pengusulan RPerpres Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menjadi Perpres.	Rekomendasi ini terkait agar Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan Percepatan Progres Pengusulan Rperpres Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menjadi Perpres kepada Presiden. Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Intelijen Pertahanan pada poin 3 terkait dengan Koorsidal sinergitas K/L dalam mengidentifikasi ancaman terhadap Negara tahun 2023 dan perumusan kebijakan Pertahanan Negara.	100

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
b.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BNPT Nomor B-104/HN.00.01/9/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Rekomendasi tentang Penentuan wilayah Propinsi sebagai Lokasi Implementasi Program Penanggulangan Terorisme.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Intelijen Pertahanan pada poin 2 Koorsidal sinergitas rencana aksi nasional program deradikalisasi K/L serta sinergitas intelijen dalam dukung program territorial TNI di Papua dan Papua Barat.	100
c.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri selaku Kepala BNPP, Panglima TNI, dan Ketua Badan Amil Zakat Nomor B-144/HN.01.01/11/ 2022 tanggal 2 November 2022 Hal Rekomendasi tentang Kelanjutan MoU Baznas dan TNI tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan untuk Mendukung Pertahanan NKRI.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Intelijen Pertahanan pada poin 1 terkait dengan Koorsidal monitoring perkembangan situasi di wilayah Indonesia lainnya (Pemantauan eskalasi ancaman terhadap kedaulatan Negara di wilayah perbatasan).	100
3.	Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan		100
a.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor B-44/HN.02/ 04/2022 tanggal 12 April 2022 perihal Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Kepulauan Anambas.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan pada poin 1 terkait dengan Koorsidal Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan PPKT.	100
b.	Surat Rekomendasi kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri Nomor B-93/HN.02/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penyelesaian Batas Darat Negara.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan pada poin 2 isu strategis terkait dengan KoorsidalPercepatan Penyelesaian Batas Negara.	100

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
4.	Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan		100
a.	Surat Rekomendasi Deputi Bidkor Pertahanan Negara kepada Sekjen Kenenterian Pertahanan Nomor B-2109/HN.00.03/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Monitoring Pencapaian dan Target Pemenuhan MEF.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Kuat, Puan, Kerma Pertahanan pada poin 1 isu strategis terkait dengan Koorsidal Pemenuhan Minimum Essential Force (MEF).	100
b.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan Nomor B-85/HN.00.03/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Penyusunan Perencanaan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Kuat, Puan, Kerma Pertahanan pada poin 5 isu strategis terkait dengan Koorsidal Pelaksanaan Tugas TNI dalam rangka OMP dan OMSP.	100
c.	Surat Rekomendasi Sesmenko Polhukam kepada Sekjen Kemhan Nomor B-3160/HN.00.003/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Hal Monitoring Pencapaiandan Target Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista.	Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Kuat, Puan, Kerma Pertahanan pada poin 2 terkait Koorsidal KontribusiIndustri Perta-hanandalam Pemenuhan Alutsista TNI.	100
Total Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional. Rata-rata (Asdep1 + Asdep2 + Asdep3 + Asdep4) : 4 = 100 + 100 + 100 + 100 = 400 : 4 = 100%			400

∑ = μ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

∑ = (400 : 4)% = 100%

Sehingga besaran Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam dokumen perencanaan nasional sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak sepuluh Rekomendasi yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Negara, Dari sepuluh Rekomendasi yang dihasilkan = Rata-rata (Asdep1 + Asdep2 + Asdep3 + Asdep4) : 4 = 100 + 100 + 100 + 100 = 400 : 4 = 100%.

c. **Indikator Kinerja 1.3**: **Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti.**

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber data dari indikator ini adalah rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti:

$\sum$ = **μ% Capaian Butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti**

Keterangan: μ: rata-rata

Hingga akhir periode Triwulan IV pada tanggal 31 Desember 2022, capaian rekomendasi oleh keasdepan di jajaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, adalah sebagai berikut:

DAFTAR REKAPITULASI REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Capaian (%)
1.	Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan			0
a.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan Nomor B-178/HN.00.00/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Rekomendasi Penguatan Industri Pertahanan melalui Pemberdayaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).	Belum Ada	Masih dalam proses analisis permasalahan untuk dibuatkan menjadi rekomendasi.	0
b.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BNPB Nomor B-182/HN.00.00/12/2022tanggal 28 Desember 2022 perihal Rekomendasi Penguatan Sinergitas K/L dengan TNI/Polri dalam penanggulangan bencana dan bahaya pandemi.		Masih dalam proses analisis permasalahan untuk dibuatkan menjadi rekomendasi.	

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Capaian (%)
2.	Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan			50
a.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-35/HN.00.01/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Rekomendasi Percepatan Proses Pengusulan RPerpres Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menjadi Perpres.	Rekomendasi ini terkait agar Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan Percepatan Progres Pengusulan RPerpres Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menjadi Perpres kepada Presiden.	Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara dengan mengirimkan surat Nomor R-92/M/D-1/HK.03.00/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 kepada Menteri Pertahanan agar segera melaksanakan pengkajian kembali terhadap RPerpres tersebut bersama dengan K/L terkait. Surat Mensesneg ini ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan dengan mengirimkan surat Nomor R/384/M/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Laporan Tindak Lanjut R-Perpres Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg TA. 2020-2044 kepada Presiden RI.	100%
b.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BNPT Nomor B-104/HN.00.01/9/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Rekomendasi tentang Penentuan wilayah Propinsi sebagai Lokasi Implementasi Program Penanggulangan Terorisme.		Belum ada tindak lanjut.	0

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Capaian (%)
c.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri selaku Kepala BNPP, Panglima TNI, dan Ketua Badan Amil Zakat Nomor B-144/HN.01.01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022 Hal Rekomendasi tentang Kelanjutan MoU Baznas dan TNI tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan untuk Mendukung Pertahanan NKRI.		Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Baznas dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Bersama-sama dengan BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau dan BAZNAS Kabupaten Anambas dalam mendukung pelaksanaan program pengolahan hasil laut menjadi makanan siap saji. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Anambas dan BAZNAS Kabupaten Anambas untuk melakukan asesmen kelayakan mustahik penerima manfaat program dan pembentukan kelompok usaha. 3. Menyusun perencanaan, anggaran, dan kelayakan usa ha produk olahan ikan dalamkemasan. 4. Pendistribusian dan serapan produk olahan melalui program stunting dan kebencanaan dan akan ditawarkan pula kepada BAZNAS-BAZNAS daerah lainnya.	

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Capaian (%)
3.	Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan			0
a.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor B-44/HN.02/04/2022 tanggal 12 April 2022 perihal Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Kepulauan Anambas.	1. Mengevaluasi dan merencanakan kembali program pembangunan perbatasan yang belum terrealisasi. 2. Mengakomodir usulan pembangunan yang diajukan Pemkab Anambas pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 dgn mempertimbangkan rencana pengelolaan dan pembangunan kawasan strategis Laut Natuna Utara.	1. Belum ada tindak lanjut. 2. Belum ada tindak lanjut.	0% 0%
b.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU Nomor B-80/HN.02/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penyelesaian Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).		1. Belum ada tindak lanjut. 2. Belum ada tindak lanjut.	0 0
4.	Asisten Deputi Korrdinasi Kekuatan, Kemampuan Dan Kerjasama Pertahanan			66,6
a.	Surat Rekomendasi Deputi Bidkor Pertahanan Negara kepada Sekjen Kenenterian Pertahanan Nomor B-	1 Tetap melakukan perhitunganc apaian MEF hingga 2024 dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk	a. Capaian MEF saat ini sebesar 63,48%.	100

No.	Judul Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Capaian (%)
	2109/HN.00.03/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Monitoring Pencapaian dan Target Pemenuhan MEF.	melakukan penyesuaian dan penjabaran strategi yang dilakukan terhadap kebijakan pembangunan Kekuatan Pokok/Essential Forces sesuai dengan Perpres No. I Tahun 2021 tentang Jakkum Hanneg tahun 2020-2024 tersebut dengan Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap tahun. 2. Melaksanakan sinkronisasi dengan Mabes TNl, Mabes Angkatan, dan terkait program prioritas nasional bidang Hanneg dlm RPJP Nasional 20 tahun dan RPJMN 5 tahun dgn susun indikator pembangunan pertahanan yg implementatif dan terukur.	b. Adanya Kepmen 427 Tahun 2022 tentang Pembangunan Sishanneg merupakan dasar hukum bahwa MEF tidak lagi menjadi program yang ditetapkan untuk dilanjutkan. Hal ini mengacu pada Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Jakum Hanneg	100
b.	Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan Nomor B-85/HN.00.03/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Penyusunan Perencanaan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.	Mendorong Kemhan untuk bekerjasama dengan K/L/D untuk menyusun Perencanaan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk memperciapkan secara dini Pertahanan Negara yang bersifat semesta baik menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer.	Belum ada tindak lanjut.	0

∑ = μ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti adalah sebesar (rata-rata butir rekomendasi yang ditindaklanjuti dari setiap asdep : 4 keasdepan) x 100% = ((0 + 66,67% + 100% + 100%) : 4) x 100% = 266,67% : 4 = 66,67%. Sedangkan

Capaian Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjut adalah capaian 66,67% dari target 80% rekomendasi kebijakan bidang koordinasi pertahanan negara yang ditindaklanjuti sehingga besaran nilainya adalah (66,67% : 80%) x 100% = 83,33%.

Tabel 3.4 Rata-rata capaian Butir-butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang sudah ditindaklanjuti

Unit Eselon II	Rekomendasi yang Dihasilkan	Butir Rekomendasi yang Dihasilkan	Tindak Lanjut dari Butir Rekomendasi yang Dihasilkan	Persentase Butir Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	% Capaian
Asdep 1	2 rekomendasi	3	0	0	0
Asdep 2	3 rekomendasi	9	6	66,67%	66,67%
Asdep 3	2 rekomendasi	4	4	100%	100%
Asdep 4	3 rekomendasi	4	4	100%	100%
Rata-rata Butir Rekomendasi yang Ditindaklanjuti		20	14	266,67%	66,67%

Sehingga, Besaran Persentase (%) butir rekomendasi kebijakan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak (14) empat belas butir rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dari (20) dua puluh butir rekomendasi yang dihasilkan = 66,67%.

2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

a. Indikator Kinerja 2.1: Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

1) Perencanaan Kinerja;
2) Pengukuran Kinerja;
3) Pelaporan Kinerja;
4) Evaluasi Internal; dan
5) Capaian Kinerja.

Nilai SAKIP berasal dari hasil penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam. Berikut ini adalah kategori penilaian hasil evaluasi SAKIP unit

kerja eselon I: 1. AA (>90–100); 2. A (>80–90); 3. BB (>70–80); 4. B (>60–70); 5. CC (>50–60); 6. C (>30–50); dan 7. D (0–30).

Review SAKIP telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam pada tanggal 20 September 2022 dengan menggunakan dasar yang baru dari Permen Pan RB Nomor 88 Tahun 2021. Dalam aturan baru ini, jumlah komponen yang dinilai berkurang menjadi 4 komponen dengan penambahan bobot nilai di komponen nomor 2 dan 4.

Hasil penilaian SAKIP Tahun 2022 yang diperoleh Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara adalah sebesar 76,60 dengan kategori BB dan predikat Sangat Baik. Detail perolehan nilai SAKIP tersebut, adalah :

1) Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 24 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, memperoleh nilai BB. Telah terdapat dokumen Perencanaan Kinerja pada Deputi Bidkor Hanneg yaitu Renstra Tahun 2020-2024, IKU, RKT, PK Renaksi dan POK.
   b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standard yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), memperoleh nilai BB. Dokumen Perencanaan Kinerja Deputi Bidkor Hanneg telah dipublikasikan pada website polkam.go.id, indicator keberhasilan ditetapkan dengan perjanjia kinerja pada awal tahun serta telah memenuhi kriteria SMART.
   c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, memperoleh nilai BB.
2) Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai sebesar 23,1 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan, memperoleh nilai A. Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja kinerja dan pengumpulan data kinerja yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Manual Deputi, Sekretaris Deputi dan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara serta SOP Mikro Pengajuan dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Deputi Bidkor Pertahanan Negara.

b) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai BB. Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja telah menggunakan teknologi informasi seperti google drive, E-Monev dan SAKTI.

c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, memperoleh nilai B. Pengukuran Kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian Tunjangan Kinerja dan penempatan/penghapusan Jabatan baik structural maupun fungsional.

3) Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut :

a) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, memperoleh nilai BB. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, diformulakan, direviu dan disampaikan secara tepat waktu.

b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standard menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, memperoleh nilai BB. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah serta realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

c) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, memperoleh nilai BB. Informasi Kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, serta evaluasi pencapaian keberhasilan yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi Internal memperoleh nilai sebesar 17,5 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai B. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Surat Edaran Semenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan Penyusunan Lakip di Kemenko Polhukam.
   b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, memperoleh nilai B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada tingkat Eselon I dan II di Lingkup Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara.
   c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, memperoleh nilai B. Evaluasi secara internal sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan kualitas evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan.

SAKIP di atas dilaksanakan dengan telah disusunnya dokumen sebagai berikut :

1) Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Hanneg Tahun Anggaran 2021 (Nodin Nomor B-94/EP.02.01/02/2022 Tanggal 23 Februari 2022);
2) Lakip Eselon II - Eselon IV Tahun Anggaran 2021;
3) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Eselon I – II Kedeputian Bidkoor Hanneg;
4) Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 Kedeputian Bidkoor Hanneg;
5) Melaksanakan Monev Triwulan IV tahun 2021;
6) Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan I Tahun 2022;
7) Melaksanakan Monev Triwulan I tahun 2022;
8) Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan II Tahun 2022.
9) Konsep Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan IV Tahun 2022;
10) Melaksanakan Monev Triwulan II tahun 2022.

b. **Indikator Kinerja 2.2**: **Nilai PMPRB**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses), yaitu:

1) Manajemen Perubahan;
2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
4) Penataan Tatalaksana;
5) Penguatan Pengawasan;
6) Penatan Sistem Manajemen SDM;
7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0–58.

Dalam rangka mendorong implementasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan 8 area perubahan di lingkungan Deputi IV/Bidkoor Hanneg, telah ditetapkan Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi IV/Bidkoor Hanneg Nomor 169/OT.03/1/2022 tanggal 27 Januari 2022. Selain itu, juga menetapkan Surat Perintah Tim Pokja Zona Integritas Deputi IV/Bidkoor Hanneg dalam rangka Pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi dengan Sprint Nomor 127/PW.03.04/1/2022 tanggal 27 Januari 2022.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022 pelaksanaan PMPRB telah dilaksanakan sampai dengan tahap Panel Asesor, dan nilai hasil PMPRB Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara berdasarkan hasil Panel Assessor PMPRB Unit Kerja tersebut adalah sebesar 56,06. Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara telah melaksanakan rencana aksi dan kegiatan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1) Pelaksanaan 8 area perubahan sudah dilaksanakan dengan ditetapkannya Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi

IV/Bidkoor Hanneg Nomor 169/OT.03/1/2022 tanggal 27 Januari 2022.

2) Pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan dengan menetapkan Surat Perintah Tim Zona Integritas Deputi IV/Bidkoor Hanneg Nomor 127/PW.03.04/1/2022 tanggal 27 Januari 2022.
3) Melaksanakan penguatan terhadap fungsi tim birokrasi dan asessor unit kerja dalam melakukan pemantauan implementasi reformasi birokrasi pada unit kerja Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara, sehingga nilai RB Unit Kerja tahun ini meningkat lebih baik.
4) Agen Perubahan melakukan inovasi dengan membuat SE ttg Ketentuan Pencairan dan Wabku Anggaran di Kedeputian Bidkor Hanneg.
5) Melaksanakan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana yang disesuaikan dengan Arahan Presiden terkait Jabatan Fungsional.
6) Melaksanakan dan memastikan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tingkat Unit Kerja dapat terlaksana dengan baik dan optimal, dan penjabaran kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat selaras dan mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi.
7) Melaksanakan pengendalian intern pemerintah yang lebih efektif dengan menerapkan Manajemen Resiko yang dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas.
8) Implementasi pelayanan publik yang lebih baik terus ditingkatkan, sehingga pelayanan prima dapat tercapai supaya masyarakat merasa puas menerima pelayanan.

c. **Indikator Kinerja 2.3**: **Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi**

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan. Indeks penilaian ini dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Biro PO atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian

yaitu 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sudah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Berdasarkan Nota Dinas dari Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi kepada Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Nomor B-11/PR.01.00/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 Hal Penyampaian Nilai lndeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2022. Berikut ini disampaikan bahwa tujuan penilaian adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujud-kan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan sasaran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi di lingkungan Kemenko Polhukam.

Merujuk pada dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan Nilai lndeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran TA 2022 Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara memperoleh nilai skor sebesar 88,50.

Penilaian ini dilaksanakan pada akhir tahun, adapun upaya dalam peningkatan Indeks Kepuasan Sekretariat, yaitu telah dilaksanakannya :

1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian Bidkoor Hanneg Tahun Anggaran 2021 (Nodin Nomor B-94/EP.02.01/02/2022 Tanggal 23 Februari 2022);
2) Lakip Eselon II - Eselon IV Tahun Anggaran 2021;
3) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Eselon I – II Kedeputian Bidkoor Hanneg;
4) Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 Kedeputian Bidkoor Hanneg;
5) Melaksanakan Monev Deputi Bidkoor Hanneg Triwulan IV tahun 2021;
6) Laporan Capaian Kinerja (Lakin) Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan I Tahun 2022 (Nodin Nomor B-219/EP.02.01/04/2022 Tanggal 28 April 2022);

7) Laporan Capaian Kinerja (Lakin) Eselon II Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan I Tahun 2022;

8) Melaksanakan Monev Deputi Bidkoor Hanneg Triwulan I tahun 2022;

9) Konsep Laporan Kinerja (Lakin) Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan IV Tahun 2022.

d. **Indikator Kinerja 2.4: Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara**

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Dilakukan dengan cara melakukan survei kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hanneg dari *stakeholders.*

$$\sum = \frac{\textit{Indeks Pelayanan ProgEv} + \textit{Indeks Pelayanan Umum}}{2}$$

Pelaksanaan perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan sepanjang Tahun 2022, namun demikian nilai akhir dikeluarkan pada akhir tahun anggaran berjalan. Pengukuran perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terdiri atas :

1) Aspek Layanan Tata Usana dan Umum;

Pada Aspek Tata Usana dan Umum dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun di luar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan dan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

2) Aspek Layanan Perencanaan Program dan Evaluasi.

Pada Aspek Perencanaan Program dan Evaluasi dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun di luar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, dari unsur-unsur :

- Layanan Perencanaan Program;
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022 pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022, penghitungan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I Kedeputian IV Pertahanan Negara sudah dilakukan secara mandiri dengan melaksanakan survei terhadap *stake holder* baik di internal maupun ekstenal Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara sesuai dengan layanan yang diberikan dan mendapatkan nilai dengan hasil sebesar 4,41 yang terbagi dari nilai Aspek Pelayanan TUM sebesar 4,42 dan Aspek Pelayanan Progeva sebesar 4,40 yang masing2 berbobot 50%. (4,42 + 4,40) : 2 = 4,41.

Penilaian ini dilakukan pada akhir tahun secara mandiri oleh Sekretariat Deputi Bidkor Pertahanan Negara, namun demikian pelaksanaan kegiatan sudah berjalan diantaranya dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a) Mengisi Penilaian Akhir SKP Tahun 2021;

b) Mengisi LHKPN/LHKSN/SIHARKA Tahun 2022;

c) Mengisi Rencana Kerja SKP Tahun 2022;

d) Memberikan layanan tata usaha dan umum kepada Pimpinan Rencana Kerja TA. 2022.

3. Capaian Lainnya Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara

Di luar pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati tersebut di atas, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara juga melaksanakan tugas dan mengeluarkan kebijakan, yaitu :

a. Koorsidal peningkatan sinergitas TNI-Polri dan K/L dalam Penanganan Bencana Alam dan Bahaya pandemi. Sinergitas TNI, Polri, K/L serta Pemda di bidang kebencanaan sudah terjalin dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari digelarnya latihan bersama dalam rangka menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lapangan agar dapat memberikan pertolongan maksimal bagi masyarakat yang mengalami bencana. Data tersebut didapatkan ketika dilaksanakannya kegiatan pemantauan lapangan yang dilakukan di Provinsi Bali, dan kaitan penyelenggaraan acara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;

b. Korsidal Penguatan Industri Pertahanan dalam negeri melalui penyusunan revisi regulasi terhadap industri pertahanan. Rapat dengan Kemhan, dan KKIP untuk membahas Penguatan Inhan dalam negeri melalui penyusunan revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP

c. Melaksanakan tugas untuk membuat Laporan Perkembangan Situasi dan Kondisi Ipoleksosbudhankam (Lapsit) yang menonjol di Tanah Air setiap harinya. Sampai dengan akhir periode Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan telah membuat Lapsit sebanyak 273 laporan.

d. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu (terkait peran strategis Menko Polhukam selaku Pengarah dan Pengawas Umum Pembangunan PLBN Terpadu sesuai Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan).

   Berdasarkan hasil koordinasi, monitoring dan pengendalian, progres pembangunan PLBN Terpadu (data Kemen PUPR per 31 Desember 2022) sebagai berikut:

1) PLBN Sota, telah selesai dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan Presiden RI pada tahun 2021.
2) PLBN Sei Nyamuk, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Juni 2022.
3) PLBN Yetetkun, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Juni 2022.
4) PLBN Napan, progres pembangunan fisik 99,22%, target selesai 3 Oktotber 2022.
5) PLBN Serasan, progres pembangunan fisik 97,85%, target selesai Agustus 2022.
6) PLBN Jagoi Babang, progres pembangunan fisik 84,63%, target selesai Februari 2023.
7) PLBN Labang, progres pembangunan fisik 46,47%, target selesai November 2022.
8) PLBN Long Nawang, progres pembangunan fisik 46,09%, target selesai Desember 2022.
9) PLBN Long Midang, progres pembangunan fisik 5,63%, target selesai tahun 2023.
10) PLBN Sei Kelik, belum dilakukan pembangunan, masih proses penyelesaian lahan.
11) PLBN Oepoli, belum dilakukan pembangunan, menunggu penyelesaian batas darat RI-RDTL.

e. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (terkait peran strategis Menko Polhukam selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sesuai Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT)

   Kemenko Polhukam sampai saat ini terus mengawal ketat proses revisi Perpres Nomor 78 Tahun 2005. Rancangan Perpres Perubahan masih dalam proses penyusunan oleh Tim Panitia Antar Kementerian yang dibentuk oleh Kementerian KP.

f. Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (terkait peran strategis Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaa Perbatasan sesuai Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan).

Pembangunan kawasan perbatasan TA. 2022 saat ini tengah dilakukan oleh K/L terkait di bawah koordinasi BNPP dengan total alokasi anggaran sebesar 10,514 Triliyun Rupiah. Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022 sebagai simbol yang menandai dimulainya pembangunan di seluruh kawasan perbatasan dilakukan oleh Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP pada tanggal 24 Mei 2022 di Kab. Kep. Talaud, Prov. Sulut.

g. Dalam rangka mendukung penyelesaian masalah dugaan Penguasaan dan Pengelolaan Tanah SPBU 54.671.08 oleh Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, Pasuruan, Jawa Timur, Asdep Koordinasi Kuatpuanhan dengan menyusun surat Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Nomor B-671/HN.00.03/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 hal Tanggapan terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Tanah SPBU 54.671.08 oleh Yonzipur 10/JP2 Kostrad Pasuruan, Jawa Timur.

h. Mendukung tertib administrasi pemberian gelar pahlawan nasional, Asdep Koordinasi Kuatpuanhan telah menyusun surat Menko Polhukam kepada Menteri Sosial Nomor B-42/HN.00.03/3/2022 tanggal 31 Maret 2022, Hal Penerusan Audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Bima yang mengusulkan Alm. Sultan Muhammad Salahuddin untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional.

i. Mendukung tertib administrasi menjadi anggota Veteran RI, Asdep Koordinasi Kuatpuanhan telah menyusun surat Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Nomor B-1794/HN. 00.03/6/2022 tanggal 21 Juni 2022, Hal Tanggapan terhadap Permohonan Penjelasan Syarat menjadi Veteran Trikora Pembebasan Irian Barat.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data Laporan Keuangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyerapan anggaran Kedeputian IV/Hanneg sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022 dari pagu anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* menjadi sebesar Rp.9,286,140,000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dapat direalisasikan atau terlaksana penyerapan sebanyak Rp.9,246,378,178,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 99,57% (Sembilan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Tujuh Persen).

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan IV Tahun 2022

Kode Kegiatan	**Nama Kegiatan**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi TW IV (Rp)**	**Sisa Pagu (Rp)**	**Realisasi (%)**
1	2	3	4	5	6
2448 4554.ABE.001	Koord. Doktrin dan Strategi Pertahanan	1,253,980,000	1,244,673,500	9,306,500	99.26 %
2453 4554.ABE.002	Koord. Intelijen Pertahanan	2,477,347,000	2,469,101,997	8,245,003	99.67 %
2480 4554.ABE.003	Koord. Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	1,999,290,000	1,994,479,745	4,810,255	99.76 %
2477 4554.ABE.004	Koord. Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	2,359,256,000	2,349,596,730	9,659,270	99.59 %
5894 4554.EBA 4554.EBD	Sekretariat Deputi Koordinasi Pertahanan Negara	1,196,267,000	1,188,526,206	7,740,794	99.35%
4554	**TOTAL KEDEPUTIAN IV =**	**9,286,140,000**	**9,246,378,178**	**39,761,822**	**99.57%**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja (Lakin) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2022 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Laporan Capaian Kinerja (Lakin) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2022 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang diperoleh hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2022, adalah Baik, meskipun dua indikator kinerja tidak dapat mencapai trget yang ditentukan, tetapi empat indikator kinerja berhasil melampaui target dan satu indiktor kinerja berhsil mencapai target yang ditentukan. Namun demikian, secara umum proses pelaksanaan kinerja program dan kegiatan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat berjalan dengan baik dan terus dilakukan dengan dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak, baik internal Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun pihak eksternal (*stakeholder*).

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

LAMPIRAN

REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN KEDEPUTIAN BIDKOR PERTAHANAN NEGARA S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2022

A. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin Dan Strategi Pertahanan

1. Menghadiri Rapat Kerja dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan dengan tema : "Penatalaksanaan Sistem Keamanan Laut melalui Revisi Terbatas UU No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, pada tanggal 20 Januari 2022 di Tanjung Pinang, Prov. Kepri
2. Menghadiri rapat kerja dengan tema Penatalaksanaan sistem keamanan laut melalui revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada tanggal 26 Januari 2022 di Ambon.
3. Rakor membahas tindak lanjut kesiapan dan pengamanan dalam rangka Presidensi G20 Tahun 2022 pada tanggal 22 Februari 2022 bertempat di Rupat Nakula.
4. Melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dalam rangka monitoring atau peninjauan lapangan kesiapan dan sinergitas TNI, Polri, K/L, dan Pemda terkait penanggulangan bencana alam pada tanggal 28 Maret s.d 1 April 2022.
5. Rakor membahas kesiapan pengamanan dalam rangka acara Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, pada tanggal 28 Maret 2022 bertempat di Makodam IX/Udayana.
6. Rakor membahas sinergitas dan kesiapan TNI, K/L, dan Pemda terkait penanggulangan bencana alam di Provinsi Bali pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Makorem 163/WS.
7. Rakor membahas Penguatan Inhan dalam negeri melalui penyusunan revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP pada tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Rupat Dewaruci.
8. 8. Menghadiri pelaksanaan apel komandan satuan TNI AD TA 2022, pada tanggal 23 Juni 2022, di Akmil Magelang.
9. 9. Menghadiri pembekalan kepada Pasis Dikreg XLIX Sesko TNI TA 2022, pada tanggal 7 Juli 2022, di Grha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung.
10. Rakor sebelum dilaksanakan RPTM tentang R-Permenhan PTFT Kemhan di daerah pada tanggal 19 Juli 2022 di Rupat Dewaruci. Kemenko Polhukam Jakarta.
11. Menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia 2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Apurva Kempinski, Bali.
12. Rakor membahas Kesiapan Panitia Daerah Satgas G20 Dalam Rangka Pertemuan Tingkat Menteri di Provinsi Bali pada tanggal 30 Agustus 2022 di Rupat Makorem 163/WS, Denpasar Bali.
13. Rapat koordinasi membahas pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar mulai tanggal 1 s.d. 3 September 2022 bertempat di Hotel Tuscany Boutique, Tangerang Selatan, Banten.

14. Melaksanakan kunker dalam rangka koordinasi permasalahan sinergitas TNI dalam penanganan ancaman militer, hybrid, dan non militer di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menyusun rekomendasi keasdepan doktrin dan strategi pertahanan pada tanggal 26 s.d. 31 Desember 2022
15. Rakor Membahas peran TNI terkait sinergitas dengan instansi lain (K/L/D/I) dalam penanganan ancaman militer, hybrid, dan non militer di wilayah, pada tanggal 27 September 2022 di Makodam XIII/Merdeka.
16. Rakor Membahas Kondisi Umum Daerah Meliputi Kondisi Geografis, Ancaman dan Permasalahannya Dalam Kerangka Politik, Hukum, dan Keamanan di Provinsi Sulawesi Utara, pada tgl 28 September 2022 di Mako Lantamal VIII Manado.
17. Rakor Membahas sinergitas TNI dengan instansi lain (K/L/D/I) khususnya dalam penanggulangan bencana, pada tgl 29 Sept 2022 di Kantor BPBD Sulut.

B. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan

1. Torwil dari tanggal 9 Januari s.d. 26 Maret 2022.
2. Menghadiri rapat dari Kemenko Marves di Hotel Novotel Bogor pada tanggal 17 Januari 2022.
3. Rakor pada tanggal 23 Februari 2022 di Rupat Nakula (tentang AUKUS).
4. Rapat Persiapan OTS ke Prov. Jawa Tengah (Semarang) pada tanggal 1 Maret di Rupat Srikandi.
5. Kunker ke Prov Jawa Tengah (Semarang) pada tanggal 3 s.d. 6 Maret 2022.
6. Rakor OTS pada tanggal 4 Maret 2022 di Makodam IV/Diponegoro (Semarang).
7. Rakor OTS pada tanggal 5 Maret 2022 di CV. Umbul Wono (Semarang).
8. Rakor pada tanggal 18 Maret 2022 di Rupat Srikandi (Koordinasi dan Sinergitas Penanganan Papua).
9. Menghadiri rapat dari Kedeputian Pollugri/II di Hotel Episode pada tanggal 22 Maret 2022.
10. Rakor pada tanggal 23 Maret 2022 di Rupat Nakula (Rakor membahas strategi dan Identifikasi Potensi Ancaman dalam Pembangunan IKN Nusantara).
11. Rakor membahas Program Prioritas Menko Polhukam Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 di Ruang Sadewa.
12. Rapat Persiapan OTS ke Prov. Kaltim pada tanggal 31 Maret 2022.
13. Kunker ke Prov. Kalimantan Timur (Balikpapan/Samarinda) pada tanggal 11 s.d. 15 April 2022.
14. Rakor OTS pada tanggal 13 April 2022 di Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan.
15. Rakor OTS pada tanggal 14 April 2022 di Markas Kodim 0913/PPU.
16. Menghadiri Rapat dari Kemenko Marives pada tanggal 27 April 2022 di Swiss Bell, Bogor (terkait kerangka kapal asing di perairan Indonesia).
17. Kunker ke Pulau Miangas Prov. Sulawesi Utara pada tanggal 18 – 22 April 2022 (Persiapan pelaksanaan agenda kunjungan kerja Menko Polhukam selaku Ketua

pengarah BNPP ke PPKT Pulau Miangas dan pelaksanaan kegiatan Gerbangdutas Tahun 2022).

18. Rakor pada tanggal 17 Mei 2022 (PAGI) di Rupat Dewa Ruci/Command Center (Pencegahan berkembangnya paham radikal di lingkungan TNI AD).
19. Fullboard pada tanggal 17-19 Mei 2022 di Bogor Valley, Bogor (membahas perizinan terbang FCIS pesawat udara asing tidak berjadwal).
20. Kunker ke Prov. Sulawesi Utara pada tanggal 20-25 Mei 2022 (Pancanangan Gerbangdutas tahun 2022 oleh Menko Polhukam dan Kemendagri).
21. Rakor OTS pada tanggal 23 Mei 2022 di Melonguane.
22. Kunker ke Kab. Kep. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 7-11 Juni 2022 (Surat dari Menteri ATR/BPN).
23. Rakor pada tanggal 15 Juni 2022 di Rupat Dewa Ruci (Rakor membahas pengelolaan wilayah pertahanan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan di PPKT dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembinaan wilayah pertahanan negara).
24. Rakor pada tanggal 21 Juni 2022 di Rupat Dewa Ruci (Terkait Inpres No. 4 Tahun 2019 dan Tindaklanjutnya).
25. Rakor pada tanggal 22 Juni 2022 di Rupat Sembodro (terkait Penanggulangan Terorisme yang diwujudkan dalam sinergitas, kerjasama, terkoordinasi dan terintegrasi oleh K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam).
26. Kunker ke Prov. Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni – 1 Oktotber 2022 dari Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM (menghadiri undangan rapat sosialisasi kesepakatan bersama ttg penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat/Force Down).
27. Torwil dari tanggal 4 April – 31 Desember 2022.
28. Rakor pada tanggal 5 Oktotber 2022 di Rupat Dewa Ruci (membahas pemanfaatan teknologi rncang bangun kapal bersayap WiSE).
29. Menghadiri rakor dan sinkronisasi penanggulangan aktivitas separatisme, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan senjata pada tanggal 7-8 Oktotber 2022 (undangan dari De-II di Bigland Hotel, Bogor).
30. Kunjungan kerja peninjauan Pabrik Pengelolaan Ikan Pemberdayaan Hasil Laut Masyarakat PPKT pada tanggal 12-13 Oktotber 2022 (PT. Inbraco, Tangerang).

C. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan Dan Tata Ruang Pertahanan

1. Pemantauan lapangan implementasi kebijakan pengelolaan Wilayah Perbatasan, PPKT dan Tata Ruang Pertahanan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 22 s.d. 26 Februari 2022.
2. Pemantauan Lapangan ke Kapuas Hulu Dalam dalam rangka monitoring implementasi kebijakan pertahanan negara di wilayah perbatasan RI-Malaysia pada tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022.
3. Pemantauan Lapangan ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka monitoring atau pemantauan lapangan aspek pertahanan negara dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tanggal 11 s.d. 15 April 2022.

4. Pemantauan Lapangan ke Prov. Gorontalo dan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Prov. Sulut dalam rangka monitoring atau pemantauan lapangan implementasi kebijakan tata ruang pertahanan dan pengelolaan wilayah perbatasan dan PPKT di Pulau Bongkil terhitung mulai tanggal 28 Maret s.d 01 April 2022.
5. Pemantauan Lapangan peninjauan lapangan bersama BNPP dan K/L terkait dalam rangka persiapan kegiatan kunjungan kerja Menko Polhukam dan Mendagri beserta rombongan ke Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) Pulau Miangas dan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022 di Kab. Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 18 s.d. 22 April 2022.

Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi membahas tindak rencana tindak lanjut kerjasama di wilayah perbatasan Negara pada tanggal 25 Januari 2022 bertempat di Kemenko Polhukam dan dihadiri perwakilan dari kemendagri, Kemen KP, Kemhan, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BNPP, Baznaz.
2. Rapat Koordinasi Memahas Percepatan Pembangunan BTS USO di Kab. Kep Anambas pada tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Kemenko Polhukam dan di hadiri perwakilan dari BNPP, Pemkab Anambas, dan Kominfo.
3. Rapat Koordinasi Membahas RRWP pada tanggal 10 Mei 2022 bertempat di Kemenko Polhukam dan dihadiri perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemen KP, Kemen LHK, Kemen PUPR, Kemen PPN.Bappenas, Mabes TNI, Mabesad, Mabesal, Mabesau, BIN dan Bais TNI.\
4. Rapat Koordinasi Membahas *Time Line* Kunjungan Kerja Menko Polhukam dalam rangka Pemgawasan Umum Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu pada tanggal 31 Desember 2022 dan dihadiri perwakilan dari Kemen PUPR dan BNPP serta pejabat di lingkungan Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara.
5. Rapat Koordinasi Membahas Penyelesaian Batas Darat Negara RI-Malaysia dan RI-RDTL pada tanggal 8 Oktotber 2022 yang dipimpin oleh Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenhan, BIG dan Dittopad serta Kedeputian Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam,
6. Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBN TA. 2022 dan Rencana Kegiatan T.A. 2023 di Kawasan Perbatasan Kab. Natuna serta Koordinasi Rencana Kegiatan T.A. 2022 dan T.A. 2023 di Kawasan Perbatasan Kab. Kep. Talaud pada tanggal 19 Oktotber 2022 tempat di Kemenko Polhukam.
7. *Focus Group Discussion* (FGD) Tentang Kebijakan Strategis dalam Merealisasikan Penataan dan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dalam Pembangunan IKN Nusantara pada tanggal 24 Maret 2022 bertempat di Hotel Millenium Jakarta dan di hadiri perwakilan dari Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Mabes TNI, Kemhan, Kemen KP, Mabesau, Mabesad, Bais TNI, BIN, dan Pejabat Kemenko Polhukam.

D. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan Dan Kerjasama Pertahanan

1. Rapat Identifikasi Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan membahas Program Kerja Bidang Pertahanan Negara Tahun 2022 pada tanggal 10 Februari 2022 di Hotel Aryaduta.

2. Pemantauan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan serta Gelar Kekuatan TNI di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 s.d. 18 Februari 2022 pimpinan Asdep 4/IV Hanneg;
3. Pemantauan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan ke Banjarmasin tanggal 21- 25 Maret 2022, pimpinan Asdep 4/IV Hanneg.
4. Rapat Analisis Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan (Internalisasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024) Kamis 7 April 2022, Hotel Orchard Industri.
5. Rakor Membahas Dampak Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja terhadap Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Rupat Dewaruci tanggal 21 April 2022.
6. Rakor membahas Tanggapan Surat Permohonan PT Harapan Utama Indonesia (HUI) di Ruang Dewaruci Kemenko Polhukam pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2022.
7. Pemantauan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan ke Bali pada tanggal 23-27 Mei 2022.
8. Rakor membahas membahas Perkembangan Program Perencanaan Strategis Pertahanan Negara Semester II Tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022.
9. Rakor membahas Perkembangan Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional di Daerah Tahun 2022 di Ruang Sembodro pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022.
10. Rakor membahas Penyepakatan Pengukuran dan Pendalaman Teknis Rencana Aksi Program Prioritas Nasional Tahun 2022 Bidang Pertahanan Negara melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kemenko Polhukam dan KSP, serta Penyepakatan Pengukuran Capaian Output RPJMN 2020-2024 Bidang Pertahanan Negara pada tanggal 6 Juli 2022.
11. Pemantauan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan ke Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1-5 Agustus 2022.
12. Rakor membahas Perkembangan Kontribusi Industri Pertahanan (indhan) dalam Pemenuhan MEF Pasca Holding BUMN Industri Pertahanan pada tanggal 3 Agustus 2022.
13. Rakor membahas Penyempurnaan Organisasi TNI dalam rangka mendukung Kekuatan, Kemampuan, dan Gelar Satuan TNI pada tanggal 10 Agustus 2022.
14. Rapat Koordinasi membahas Perkembangan Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan MEF Pasca Holding BUMN Industri Pertahanan 18 Agustus 2022. (Fullday).
15. Pemantauan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan ke Provinsi Kalimantan Barat tanggal 5-9 September 2022.
16. Rakor membahas Implementasi UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Pengelolaan Komponen Cadangan tanggal 19 September 2022.
17. Pemantauan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan ke Kota Sorong, Provinsi Papau Barat pada tanggal 19-23 September 2022.
18. Rakor membahas Perkembangan Pengamanan Laut Natuna Utara dan Pengelolaan Pertahanan Udaranya Pasca diterbitkannya Perpres No 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik

Singapura tentang Penyesuaian Batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura tanggal 21 September 2022.

19. Rakor membahas Perhitungan Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Kebutuhan Alutsista berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2022 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 tanggal 23 September 2022.

E. Sekretaris Deputi Bidang Korrdinasi Pertahanan Negara

Rapat Koordinasi

1 Membahas Penyiapan Bahan Menko Polhukam dalam rangka Rapim Kemhan Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022.

2 Membahas Diseminasi Program Kerja & Anggaran TA 2022 serta Rencana Kegiatan Kerjasama Kemitraan TA.2022 tanggal 13 Januari 2022.

3 Membahas Penyempurnaan Bahan Menko Polhukam untuk Rapim Kemhan TA 2022 tanggal 13 Januari 2022.

4 Membahas Penyiapan Bahan Rapat Kerja tentang Inventarisasi Materi Terkait Revisi Terbatas UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan tanggal 21 Januari 2022.

5 Membahas Program dan Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (ATK) tanggal 24 Januari 2022.

6 Membahas Penetapan Ketentuan Pencairan & Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Program & Anggaran Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tanggal 24 Januari 2022.

7 Bimbingan Teknis Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 14 Januari 2022.

8 Tindak Lanjut FGD Pembobotan Indikator Desain Indeks Koordinasi Bidang Polhukam tanggal 14 Maret 2022.

9 Membahas Bahan Menko Polhukam dalam rangka Webinar Nasional & Call For Paper Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta “Membangun Fondasi Masa Depan Indonesia” tanggal 21 April 2022.

10 Membahas penyempurnaan bahan Deputi Bidkoor Hanneg dalam kegiatan Seminar Nasional tentang “Kebijakan Pengelolaan Migas di Laut Andaman Aceh tanggal 22 Maret 2022.

11 Membahas Persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 tanggal 12 April 2022.

12 Membahas Penyusunan Bahan Menko Polhukam dalam rangka Ceramah Pembekalan pada Proram Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan dan Sespimmen Polri TA 2022 tanggal 2 Juni 2022.

13 Bimtek Pengisian Data pada Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kedeputian Bidkoor Hanneg tanggal 9 Juni 2022.

14 Membahas Penyiapan Bahan Menko Polhukam sebagai Pembicara pada Apel Komandan Satuan TNI AD Tahun 2022 pada hari Kamis, 23 Juni 2022.

15 RIS membahas Persiapan Bahan Menko Polhukam terkait Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2022.

16 RIS membahas Penyempurnaan Bahan Menko Polhukam dalam rangka kegiatan Pembekalan kepada Pasis Dikreg XLIX Sesko TNI TA 2022.

Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat

1 Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan sosialisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instasi (SAKTI) dalam rangka Pengelolaan Perbendaharaan pada Satuan Kerja Kemenko Polhukam di Bogor Prov. Jawa Barat tanggal 24-25 Februari 2022.

2 Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kemenko Polhukam TA 2021 di Bogor Prov. Jawa Barat tanggal 18-19 Februari 2022.

3 Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat penelitian Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemenko Polhukam T.A. 2023 di Bogor Prov. Jawa Barat tanggal 25 Januari 2022.

4 Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat Membahas Isu Kerja Sama Kawasan Perbatasan pada tanggal 7 s.d. 9 Maret 2022 di Hotel Permata, Bogor Jawa Barat

5 Menghadiri Pelaksanaan Kegiatan Penyegaran dan Bimbingan Teknis E-Monev Bappenas Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Kemenko Polhukam pada Hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 di Hotel Salak Heritage Bogor Provinsi Jawa Barat.

6 Menghadiri Pelaksanaan Kegiatan Keselarasan Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) T.A. 2023 dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) T.A. 2023 di Lingkungan Kemenko Polhukam pada Hari Senin Tanggal 28 Maret 2022 di Kota Bekasi Jawa Barat.

7 Menghadiri Rapat Koordinasi Membahas Identifikasi Potensi Permasalahan Terkait Kerja Sama di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Internasional pada hari Senin, 21 Maret 2022 di Swiss-Beliin Hotel Bogor Jawa Barat.

8 Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID Kemenko Polhukam Tahun 2022 pada Tanggal 8 s.d. 9 April 2022 di Hotel Sahira Butik Paledang, Bogor Jawa Barat.

9 Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri FGD Penguatan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta untuk Menopang Diplomasi Pertahanan Nasional di Bogor Jawa Barat Tanggal 13 April 2022.

10 Melaksanakan tugas menghadiri Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pada tanggal 18 April 2022 di Bigland Hotel In'L & Convention Hall Bogor Jawa Barat.

11 Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi terkait Overview Persiapan Migrasi Aplikasi Sakti Modul Pelaporan TA 2022 Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Tanggal 20 s.d. 21 Juni 2022 di Hotel Cordella Senen, Jakarta.

12 Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Penginputan Aplikasi SAKTI Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul GLP Kemenko Polhukam di Kota Bogor Jawa Barat Tanggal 29 s.d. 31 Desember 2022.

13. Menghadiri Pelaksanaan Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Capaian Output Bulan Mei dan Juni T.A. 2022 di Hotel Horison Ultima Bekasi Prov. Jawa Barat tanggal 31 Desember s.d. 1 Februari 2023.

14. Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Tanggal 7 Juni 2022 di Bogor Jawa Barat Tanggal 7 s.d. 8 Juni 2022.

15 Melaksanakan Tugas Menghadiri Bimbingan Teknis Aplikasi KRISNA Bappenas di Lingkungan Kemenko Polhukam pada tanggal 23 Juni 2022 di Bogor Jawa Barat.

16 Menghadiri Kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Kemenko Polhukam di Bogor Jawa Barat Tanggal 15 Juni 2022.

Fullboard

1 Melaksanakan Kegiatan Rapat Fullboard Meeting Bimbingan Teknis Aplikasi SIRUP di Bogor Provinsi Jawa Barat Tanggal 10 s.d. 11 Maret 2022.

2 Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penilaian Prestasi Kerja Tahun Anggaran 2022 Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terhitung mulai tanggal 30 Maret s.d. 1 April 2022 bertempat di Jakarta.

3 Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penilaian Prestasi Kerja Tahun Anggaran 2022 Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terhitung mulai tanggal 30 Maret s.d. 1 April 2022 bertempat di Jakarta.

4. Melaksanakan Kegiatan Rapat Fullboard Membahas Penajaman Isu-isu Strategis pada Program Kerja dan Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara T.A. 2023 yang akan dilaksanakan pada Tanggal 21 s.d. 22 April 2022 di Hotel 101 Urban Jakarta.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
Nomor B- 92 /EP.02.00/02/2023

Yth.	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
D a r i	:	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Hal	:	Penyampaian LAKIP Eselon I Triwulan IV Tahun 2022
Tanggal	:	10 Februari 2023

Merujuk Program Kerja Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan ini menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I sebagai pertanggungjawaban kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.

Heri Wiranto, S.E.,M.M.,M.Han.

Tembusan:
1. Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Inspektur Kemenko Polhukam.